

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	19
3. Tujuan Penelitian.....	20
4. Manfaat Penelitian.....	20
5. Tinjauan Pustaka.....	21
6. Metode Penelitian.....	47
a. Tipe Penelitian.....	47
b. Pendekatan Masalah.....	47
c. Bahan Hukum.....	48
d. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	49
7. Pertanggungjawaban Sistematis.....	50
BAB II. KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) MENURUT UU NO.5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.....	52
1. Ruang Lingkup Pegawai Aparatur Sipil Negara.....	52
2. Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP).....	70
3. Penyelesaian Sengketa.....	97
BAB III. PERBANDINGAN KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PERUSAHAAN.....	108
1. Ruang Lingkup Perbandingan.....	108

2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan.....	124
3. Penyelesaian Sengketa.....	141
BAB IV. PENUTUP.....	160
1. Kesimpulan.....	160
2. Saran.....	162

DAFTAR BACAAN



DAFTAR BAGAN

Bagan I	Bagan Hubungan Jabatan Dengan Pekerjaan, dan Kedudukan Pada Suatu Unit Organisasi.....	82
Bagan I	Bagan Hubungan Jabatan Dengan Pekerjaan, dan Kedudukan Pada Suatu Unit Organisasi.....	114



DAFTAR TABEL

Tabel I	Ruang Lingkup Perbandingan Antara Perjanjian Kerja PPPK dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	122
---------	--	-----



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025

